

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pertumbuhan dan perkembangan pada suatu wilayah tentunya dapat dilihat dari peningkatan pembangunan didalamnya. Pembangunan sendiri merupakan suatu proses perubahan yang terjadi secara berkala dalam kurun waktu yang telah direncanakan oleh berbagai segi di kehidupan. Adanya proses pembangunan tersebut guna meningkatkan potensi perekonomian masyarakat di wilayah ataupun lokasi pelaksanaan pembangunan. Tentu dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan suatu wacana atau rencana yang diperoleh dari hasil keputusan kebijakan yang dibuat oleh para elit di pemerintahan maupun pihak swasta lainnya. Dari perencanaan tersebut tentu saja menghasilkan suatu pencapaian, meskipun hasil pencapaian tersebut akan terlihat secara bertahap agar selalu menemukan perubahan baru yang menjadikan pembangunan tersebut terlaksana dengan hasil maksimal. Maka dari itu perlu adanya partisipasi langsung dari masyarakat di wilayah tersebut agar berjalan sesuai dengan norma-norma serta nilai-nilai tertentu dalam masyarakat.

Pembangunan merupakan suatu proses yang mampu mengubah suatu kondisi keadaan baik social, ekonomi, budaya dan lainnya dalam lingkup masyarakat menjadi lebih baik dimasa mendatang dengan melibatkan berbagai sumber daya yang ada guna meningkatkan kualitas hidup. Pembangunan yang bersifat fisik maupun nonfisik dibutuhkan untuk kemajuan suatu infrastruktur negara. Pembangunan infrastruktur yang berfungsi sebagai roda penggerak laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan social, budaya, dan ekonomi masyarakat. Adanya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah yakni dengan pembangunan infrastruktur serta oleh pihak swasta sebagai suatu mitra dalam pembiayaan proses pembangunan itu sendiri. Namun dalam proses tersebut pemerintah merupakan hal utama yang memberikan perhatian penuh agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia. Dapat dilihat kian tahun pembangunan di Indonesia mengalami kemajuan. Tidak sedikit perbaikan dari pembangunan yang telah ada sebelumnya juga mengalami perbaikan dari segi efisiensi dan lain sebagainya, serta peningkatan infrastuktur secara bertahap karena adanya peran masyarakat dalam mengkoreksi kinerja kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pada era saat ini, perlu adanya

peningkatan dalam pola pikir dari masyarakat dalam mengikuti perkembangan zaman. Seperti halnya peningkatan hasil produksi barang maupun jasa yang menjadi salah satu bagian faktor pertumbuhan laju perekonomian di daerah-daerah, serta masyarakat itu sendiri juga merupakan faktor perkembangan mobilitas dalam kegiatan tersebut. Adanya faktor-faktor dari mobilitas itu sendiri yang dimana menjadi pendorong dalam hal pendidikan, pekerjaan, perumahan yang sesuai, iklim yang menjadi lebih baik, kondisi sarana dan prasana yang mendukung, serta terdapat daya tarik untuk wisatawan dalam aktivitas di wilayah tersebut. Tentu dalam pelaksanaan mobilitas tersebut tidak hanya dapat dilalui dengan jalur transportasi darat dan laut saja, namun dapat pula dengan transportasi udara. Transportasi sendiri memiliki pengertian yakni merupakan suatu system yang dimana didalamnya terdiri atas sarana-prasarana serta adanya system pelayanan yang mungkin dapat terjadi suatu pergerakan yang menyeluruh ke wilayah-wilayah sehingga menghasilkan mobiltas penduduk yang terakomodir.¹ Dalam kemajuan era yang kian pesat salah satu transportasi yang terus berkembang yakni transportasi udara. Dalam jurnal Chang, 2010. “The Development of Regional Airports in Asia”, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengalami peningkatan jumlah penumpang transportasi udara yang cukup drastic.² Bandara merupakan bagian dari infrastruktur dalam transportasi udara yang dimana menjadi suatu pelayanan penerbangan bagi penumpang. Dengan meningkatnya jumlah penumpang transportasi udara maka dilakukan pengembangan bandara untuk dapat memenuhi kebutuhan penumpang. Transportasi udara sudah sejak era reformasi telah diperkenalkan oleh mantan presiden saat itu, yang memfasiliasi perpindahan dalam jarak dekat maupun jauh namun dengan yang tidak banyak memakan waktu. Dengan transportasi udara yakni pesawat terbang barang maupun jasa dapat terlaksana. Maka dari itu diperlukan pembangunan beberapa bandara untuk menghubungkan wilayah satu dengan wilayah yang lainnya.

Dari adanya pembangunan bandara yang dimana merupakan sebagai infrasktruktur pendukung dari terealisasinya salah satu proses kebijakan dari pemerintah. Proses pembangunan bandara tersebut tentu memiliki berbagai macam sub-sub bagian lain yakni seperti kapasitas dari pesawat itu sendiri, fasilitas yang bisa di dapatkan di lokasi bandara, jumlah tamping dari persawat yang akan transit maupun berhenti, serta berbagai macam teknis lainnya. PT. Angkasa Pura (Persero) merupakan pihak dari BUMN yang bekerjasama degan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bandara di wilayah-wilayah Indonesia. Telah sekitar sebanyak 25 bandara yang telah ditangani dengan baik. PT. Angkasa Pura terbagi atas

¹Tamin, Ofyar, Z. 2000. *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Bandung, Indonesia: Penerbit ITB

² Chang, Yu Chun. 2010. *The Development of Regional Airports in Asia*. China : National Taiwan Ocean University.

dua yakni PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II, dan pada PT. Angkasa Pura I yang menangani dan pengelolaan pembangunan bandara Internasional Adisucipto Yogyakarta.

Bandara Internasional tersebut sangatlah merupakan hal penting dalam perkembangan dan pertumbuhan wisatawan yang datang. menjadikan gerbang awal wisatawan yang akan berkunjung di wilayah Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Kian lama bandara Internasional Adisucipto mengalami peningkatan jumlah pada penumpang. Hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam mobilitas masyarakat serta bertambahnya jumlah pariwisata atau destinasi baru yang mulai dikembangkan oleh masyarakat setempat untuk menarik wisatawan.

Dari peningkatan tersebut yang menjadikan bandara internasional Adisucipto mengalami overload. Seharusnya yang dimana bandara hanya dapat menampung hanya berkisar 1,8 juta penumpang pertahunnya, namun mengalami peningkatan yang sangat signifikan sehingga mengalami kelebihan kapasitas dan sudah terhitung hingga tahun 2017 berkisar 7,8 juta penumpang.³ Serta semakin padatnya lalu lintas pada waktu penerbangan, dan juga ketidak strategisan lokasi bandara yang berada didekat pemukiman warga serta bangunan gedung bertingkat. Maka dari itu adanya wacana dari pemerintah daerah dan pihak PT. Angkasa Pura I untuk memindahkan lokasi bandara ketempat yang lebih memadai dan memiliki potensi bagus yakni di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Pengambilan kebijakan dalam relokasikan bandara Adisucipto ke New Yogyakarta International Airport merupakan langkah strategis oleh pemerintah daerah dalam melihat kelayakan. Adanya hal tersebut dapat diperkuat dengan dasar-dasar hukum yang tertulis pada peraturan daerah Nomor 1 tahun 2012 mengenai perihal Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032 yang mana dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 mengenai pengadaan tanah terhadap pembangunan untuk kepentingan umum, Surat Keputusan Gubernur D.I.Yogyakarta No.68/KEP/2015, dan putusan kasasi Mahkamah Agung No.456K/TUN/2015.⁴

Adanya rencana pembangunan bandara Internasional tersebut di sekitar wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo merupakan hasil dari kebijakan PT. Angkasa Pura I (PERSERO) yang telah disesuaikan dengan hasil Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta dan PT. Angkasa Pura. Hal tersebut juga dilatarbelakangi dengan kondisi Bandara Internasional yang berada di D.I.Yogyakarta yakni

³ Ramdhani, Gilar, "Deretan Alasan Kuat Yogyakarta Harus Segera Punya Bandara Baru" diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3241278/deretan-alasan-kuat-yogyakarta-harus-segera-punya-bandara-baru> pada tanggal 3 Juli 2019 pukul 13.10

⁴ Pemerintah daerah DIY, 2016

Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta yang mana mengalami peningkatan penumpang yang sangat tinggi dan tidak memungkinkan untuk beroperasi kembali. Wilayah yang mampu merepresentatifkan serta strategis pembangunan bandara baru yang lebih dapat menampung penumpang domestik maupun luar domestik yakni di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. Beberapa alasan mengapa D.I.Yogyakarta harus memiliki bandara internasional baru:

1. D.I.Yogyakarta menempati urutan nomor 2 setelah Bali dalam kunjungan wisata atau destinasi.
2. Dengan kapasitas 2.200 meter area parkir pesawat serta landasan pacu yang dimiliki bandara Adisutjipto tidak cukup menampung dengan proporsi pesawat berukuran besar, hanya mampu sebanyak 11 pesawat saja. Maka dari itu dapat dipastikan lahan dan kendala alam tidak dapat dikembangkan lagi.
3. Sejak dibangunnya pada tahun 1938, Bandara Internasional Adisutjipto merupakan *Civil Enclave* yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara dimana dirancang sebagai penerbangan militer. Dimana yang sekarang ini pun menjadi pangkalan utama TNI Angkatan Udara dan Pusdik Penerbang TNI Angkatan Udara.
4. Dalam meningkatkan program pemerintah yakni kualitas serta mendorong pertumbuhan dibidang pariwisata baik domestik maupun mancanegara di D.I.Yogyakarta maka dibutuhkan bandara baru yang mana tentunya lebih representatif.

Namun dari kebijakan yang ditentukan tersebut menimbulkan beberapa kendala yakni penolakan ataupun konflik dari pihak masyarakat kecamatan Temon tersebut, hingga adanya perlawanan dari masyarakat untuk bersama-sama menolak pembangunan mega proyek bandara internasional. Isu relokasi pembangunan bandara sudah berkembang semenjak tahun 2012, sehingga dengan adanya isu ini merupakan awal mula munculnya sumber konflik terkait dengan relokasi pembangunan bandara Adi Sucipto. Isu yang berkembang di masyarakat pada tahun 2012 di tambah dengan pematokan awal yang dilakukan pihak PT Angkasa Pura I bersama pemerintah tanpa dilakukannya sosialisasi terlebih dahulu mengakibatkan adanya penolakan maupun perlawanan dari masyarakat.

Lahan diwilayah kecamatan Temon yang memiliki luas sekitar 645,63 ha merupakan pemicu terjadinya awal konflik karena adanya wacana menjadi lokasi mega proyek Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang nantinya akan

berpindah operasi dan fungsi bandara di Yogyakarta. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik secara langsung yakni masyarakat, Pemerintah Daerah, dan PT. Angkasa Pura I. Pemerintah Daerah memainkan peran sebagai petugas yang menyediakan lahan lokasi pembangunan bandara, sosialisasi, membentuk tim penerima keberatan, melakukan pematokan lahan, pembentukan tim appraisal, membantu proses ganti rugi, pengukuran lahan, menyediakan lahan relokasi untuk masyarakat terdampak, dan lain sebagainya. Peran pemerintah daerah sejatinya untuk membantu PT. Angkasa Pura I mencapai kesuksesan dalam percepatan pembangunan bandara NYIA yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum sebagai legitimasi hukum.

Kini di pihak masyarakat mengalami perpecahan pasca adanya rencana Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda kepentingan. Kelompok pertama adalah masyarakat yang mendukung dan kelompok kedua adalah masyarakat yang menolak Pembangunan Bandara NYIA di Kecamatan Temon. Masyarakat pendukung merupakan sekelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi, menerima ganti rugi dan relokasi. Mereka menyerakan hak atas tanah dengan penuh penyesalan, sebab lahan pertanian milik mereka telah di miliki oleh PT Angkasa Pura I. Jumlah masyarakat yang siap direlokasi sebesar 518 Kepala Keluarga (KK). Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo telah mempersiapkan lahan relokasi untuk masyarakat terdampak.⁵

Setelah adanya pematokan yang dilakukan pemerintah bersama pihak PT. Angkasa Pura I dengan tujuan untuk mengetahui titik koordinat luasan tanah yang menjadi calon lokasi pembangunan bandara, maka membuat masyarakat marah. Pasalnya pematokan yang dilakukan tersebut tanpa adanya pemberitahuan kepada masyarakat. Peran pemerintah semakin memperpuruk ekonomi masyarakat di Kecamatan Temon, akibat dari persediaan lahan yang sempit dan menghapus hak milik menjadi hak pakai atas tanah. Hal ini yang membuat masyarakat mengalami penyesalan yang amat menyakitkan. Karena tanah yang telah di kelolah berpuluh-puluh tahun kini di serobot oleh PT. Angkasa Pura I yang menggunakan legitimasi kebijakan politik atas dasar pembangunan dan demi kepentingan umum. Setelah kejadian tersebut pada tanggal 9 September 2012 muncul inisiasi masyarakat untuk membuat sebuah gerakan masyarakat petani yang bernama organisasi Wahana Tri Tunggal (WTT). Organisasi

⁵ Kedaulatan Rakyat, *Percepatan Pembangunan Bandara 518 KK Siap Direlokasi*. 14 September 2016, hlm 6

WTT ini merupakan wadah untuk mengeluarkan aspirasi masyarakat terkait dengan penolakan pembangunan bandara. Wujud nyata perjuangan WTT berupa tindakan aksi penghadangan terhadap pemasangan patok koordinat oleh tim Persiapan Pembangunan Bandara Baru (P2B2) pada tanggal 7 Januari 2014 di wilayah Pedukuhan Sidorejo, Desa Glagah, Kecamatan Temon. Masyarakat melakukan aksi spontan ketika melihat rombongan Pemkab Kulon Progo, BPN, dan PT. Angkasa Pura I memasang patok di wilayah Pedukuhan Kretek yang berbatasan langsung dengan Sidorejo. Dalam aksi tersebut, Mardi Suwito selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa warga hingga saat ini tidak merelakan lahannya dijadikan lokasi pembangunan bandara NYIA. Artinya masyarakat tak rela tanahnya dirampas. Camat Temon, Jaka Prasetya, membenarkan bahwa akibat penolak masyarakat sehingga tim P2B2 mengurungkan niat memasang patok. Hal ini dilakukan oleh masyarakat karena hampir dari sebagian tanah yang menjadi calon lokasi pembangunan bandara merupakan milik masyarakat dan sebagian lagi milik Paku Alam Ground (PAG).

Faktor status tanah ini yang menyebabkan masyarakat melakukan perlawanan, sehingga konflik relokasi pembangunan bandara sampai tahun 2015 belum dapat terselesaikan dengan maksimal. Disisi lain juga disebabkan karena lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan merupakan sebagian lahan milik masyarakat setempat dan sebagian lagi yakni lahan milik Paku Alaman Ground (PAG). Tidak menyurutkan rencana awal dalam merealisasikan rencana pembangunan mega proyek bandara internasional PT. Angkasa Pura I tetap terus optimis. Kondisi ini semakin memburuk semenjak adanya pematokan yang dilakukan pihak PT. Angkasa Pura I bersama Pemerintah Kabupaten dan aparat keamanan pada tahun 2012 yang dilakukan tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat.

Kronologi konflik agraria di Kecamatan Temon selalu di liput media cetak dan elektronik. Wahana Tri Tunggal (WTT) yang didalamnya merupakan masyarakat yang tergabung dalam pihak kontra pembangunan tersebut, pernah melakukan suatu tindak yakni aksi protes terhadap hasil keputusan kebijakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 68/KEP/2015 tentang Izin Penetapan Lokasi (IPL) Pembangunan Bandara NYIA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi tersebut tidak hanya secara unjuk rasa saja, namun juga melayangkan gugatan yang didampingi langsung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Yogyakarta yang selaku kuasa hukum WTT di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁶ Tanggal 23 Juni 2015, gugatan masyarakat tersebut membuahkan hasil yang baik,

⁶ Tribun Jogja, *Sultan Tak Masalahkan Gugatan IPL*. 1 Juli 2015

yakni dengan keluarnya putusan penerimaan gugatan masyarakat yang tergabung dalam WTT mengenai penerbitan Izin Penetapan Lokasi (IPL) oleh Gubernur D.I.Yogyakarta bernomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di D.I.Yogyakarta yang bertepatan pada wilayah pesisir selatan di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Hakim PTUN D.I.Yogyakarta telah menyatakan bahwa, Gubernur D.I.Yogyakarta dalam mengeluarkan IPL tersebut tidak sah, dimana telah menyalahi terhadap aturan perundang-undangan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), meliputi Peraturan Pemerintah (PP) tentang RTRW nasional, Peraturan Presiden (Perpres) tentang RTRW Jawa-Bali, serta Peraturan Daerah (Perda) D.I.Yogyakarta tentang RTRW D.I.Yogyakarta.⁷

Demi perjuangan membela lahan pertanian produktif, Wahana Tri Tunggal (WTT) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta melangkah pada proses perjuangan ke tahap mengajukan uji materi di Pengadilan Negeri (PN) Wates terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032. Masyarakat melakukan penolakan atas Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo yang menjadikan Kecamatan Temon sebagai kawasan pembangunan bandara NYIA. Masyarakat beranggapan bahwa zona pembangunan bandara adalah tempat mereka hidup di lahan pertanian dan kawasan wisata.

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai latar belakang dinamika konflik agraria pasca adanya rencana Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Tahun 2012-2016 di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Maka dianggap begitu penting untuk meneliti lebih mendalam tentang keadaan masyarakat yang terlibat di dalam konflik. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan untuk mencari titik penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Temon.

⁷ http://www.kompasiana.com/jk.martono/ptun-yogyakarta-menangkan-warga-proyek-bandara-baru-di-diy-terhenti_558e9820f3927327088b456b. Diakses tanggal 10 Maret 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika konflik kepentingan dalam kebijakan pasca adanya rencana Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kolon Progo?
2. Bagaimana upaya dalam penyelesaian konflik kepentingan dalam kebijakan pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kolon Progo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dinamika konflik kepentingan sebagai dampak adanya pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kolon Progo.
2. Mengetahui adanya upaya yang dibangun atas penyelesaian konflik kepentingan dalam hal kebijakan pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kolon Progo.
3. Mengetahui perihal aktor-aktor yang terkait dengan upaya penyelesaian permasalahan konflik kepentingan dalam kebijakan pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kolon Progo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu bahan evaluasi maupun rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menentukan kebijakan di bidang pertanahan dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat, terutama tanah-tanah yang produktif akan lahan pertanian.
2. Sebagai informasi bagi pelaku politik, aktivis, mahasiswa, akademisi atau peneliti lain yang berhubungan dengan konflik kepentingan.

1.5 Kerangka Teoritik

1.5.1 Teori Konflik

1.5.1.1 Pengertian Konflik

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Maka dari itu, konflik dengan integrasi sosial saling berhubungan dan mengisi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak ada yang memiliki kesamaan baik dari segi unsur etnis, kemauan, kehendak, kepentingan, tujuan, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan apabila konflik yang terjadi tidak menemukan penyelesaian yang tepat akan terjadi aksi-aksi kekerasan. Akar konflik merupakan penentu awal dari aksi kekerasan karena sudah tidak dapat dicari hasil yang terbaik dari berbagi pihak.

Konflik adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya. Istilah konflik dalam pendekatan politik sendiri dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.⁸ Berikut merupakan klasifikasi bentuk konflik, diantara lain:

⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta: hlm149, 1992

A. Berdasarkan sifatnya

Konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

1. Konflik Destruktif adalah konflik yang dimana akan terjadi disebabkan oleh adanya perasaan tidak suka hingga mengarah ke benci pada seseorang ataupun kelompok dari pihak lain yang bertentangan.

2. Konflik Konstruktif adalah konflik yang dimana bersifat fungsional, terjadi disebabkan adanya perbedaan pendapat dari internal kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Adapun yang dihasilkan dari konflik seperti ini yaitu suatu konsensus dari berbagai pendapat yang diutarakan sehingga memutuskan suatu perbaikan.

B. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik.

1. Konflik Vertikal yaitu konflik yang terdiri dari berbagai unsur di masyarakat dalam suatu struktur yang memiliki hierarki.

2. Konflik Horizontal yaitu konflik terjadi karena kedudukan yang sama rata antara individu maupun kelompok.

3. Konflik Diagonal yaitu konflik terjadi disebabkan adanya ketidak sama rata dan keadilan terhadap alokasi sumber daya ke seluruh keanggotaan di suatu organisasi dan berdampak pertentangan sangat ekstrim. Menurut Soerjono Soekanto (2009:94) konflik sosial terbagi menjadi lima bentuk yakni: 1. Konflik atau pertentangan pribadi, merupakan konflik yang terjadi karena individu satu dengan yang lain berbeda pandangan 2. Konflik atau pertentangan rasial, merupakan konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras. 3. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, merupakan konflik terjadi disebabkan oleh perbedaan kepentingan antar kelas social. 4. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. 5. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.⁹ Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut :

1. Konflik peran merupakan suatu keadaan dimana individu harapan yang bertolakbelakang dengan peranan yang dimiliki. 2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial. 3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.

⁹ Soerjono, Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Rajawali Pers Jakarta. Hlm.94

4. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi internasional.

Pada dasarnya tahapan konflik dapat dilihat dalam beberapa tahapan. Perkembangan konflik biasanya melewati tiga tahapan, yaitu:

1. Latent Tension (unreal conflict), konflik masih dalam bentuk kesalahpahaman antara satu dengan lainnya, tetapi anatarapihak yang bertentangan belum terlibat dalam konflik.
2. Nescent Confilct, konflik mulai tampak dalam bentuk pertentangan meskipun belum menyertakan ungkapan-ungkapan ideologis dan pemetaan terhadap pihak lawan secara terorganisir.
3. Intensified Conflict, konflik berkembang dalam bentuk yang terbuka disertai dengan radikalisis gerakan di antara pihak yang saling bertentangan dan masuknya pihak ketiga ke dalam arena konflik.¹⁰

Konflik politik merupakan suatu gejala yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berpolitik. Fenomena konflik politik tersebut mendapat perhatian bagi manusia, sehingga muncul penelitian-penelitian yang menciptakan dan mengembangkan berbagai pendapat atau pandangan tentang konflik politik. Charles Watkins berpendapat bahwa konflik terjadi bila terdapat beberapa hal. Yang pertama yakni, konflik antar dua pihak sekurang-kurangnya yang mana secara potensial dan praktis ataupun operasional memiliki kemampuan untuk menghambat.¹¹ Konflik politik merupakan suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak, ketika keduanya menginginkan suatu kebutuhan yang sama dan ketika adanya hambatan dari kedua belah pihak.

Istilah konflik dalam ilmu politik sering dikaitkan dengan kekerasan seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi konflik mengandung pengertian “benturan” seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antar individu dengan individu, individu dan kelompok dan kelompok dengan kelompok dan individu dan kelompok atau pemerintah. dengan demikian konflik merupakan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok maupun organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh

¹⁰ http://benyahya.student.umm.ac.id/download-as-pdf/umm_blog_article_184.pdf diakses pada tanggal 20 April 2012

¹¹ Watkins, Charles

pemerintah (Lembaga Edukatif, Legislatif, Yudikatif) secara sempit konflik politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan struktur dan prosedur yang mengatur hubungan diantara partisipan politik.

Dahrendorf pada inti tesisnya mengemukakan gagasan bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Dahrendorf tidak hanya tertarik pada struktur posisi, tetapi juga pada konflik antara berbagai struktur posisi itu: “sumber struktur konflik harus dicari di dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan” (1959:165)¹²

Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diartikan mengendalikan bawahan. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum; mereka yang tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari kontrol, ditentukan di dalam masyarakat. Karena otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang.¹³

Ini berarti legitimasi otoritas selalu terancam. Konflik kepentingan ini tak selalu perlu disadari oleh pihak subordinat dan superordinat dalam rangka melakukan aksi. Kepentingan superordinat dan subordinat adalah objektif dalam arti bahwa kepentingan itu tercermin dalam harapan (peran) yang dilekatkan pada posisi. Harapan peran yang tak disadari ini disebut Dahrendorf kepentingan tersembunyi. Kepentingan nyata adalah kepentingan tersembunyi yang telah disadari. Bagaimanapun juga, aktor tak selalu perlu menyadari kepentingan mereka untuk bertindak sesuai dengan kepentingan itu.¹⁴

1.5.1.2 Struktur Konflik

Menurut Paul Conn, situasi konflik pada dasarnya dibedakan menjadi konflik menang-kalah (Zero-sum conflict) dan konflik menang-menang (non-zero-sum conflict). Konflik menang kalah ialah situasi konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak tercapainya suatu kompromi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan menang-menang adalah situasi konflik dalam mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi dan bekerjasama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut.¹⁵

¹² George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. Pradana Media, Jakarta: hlm 154

¹³ *Ibid*, hal 155

¹⁴ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. Pradana Media, Jakarta: hlm 156

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hlm 196

Konflik menang-kalah merupakan struktur konflik yang susah untuk saling membagi atau kerja sama bahkan berdamai dan pemenang dapat memiliki kuasa atas lawannya contohnya konflik antara palestina dan israel yang masih belum menemukan titik temu atau perdamaian hingga kini maka konflik menang-kalah memang dihindari akan tetapi sebagian besar mereka yang berkonflik selalu menginginkan kemenangan diatas segalanya. Tentunya hal ini berbeda dengan menang-menang yang memungkinkan bekerja sama dan saling menikmati hasil.

1.5.1.3 Akar dan Penyebab Terjadinya Konflik

Akar penyebab konflik bisa bersumber dari adanya perbedaan-perbedaan individu, baik perbedaan kepentingan, kebudayaan maupun akibat perubahan sosial.¹⁶ Menurut pandangan Malewsky dalam Simanjuntak menyebutkan bahwa konflik juga terjadi karena hubungan yang tidak serasi antar faktor-faktor yang mendukung keberadaan status secara pribadi pada individu maupun kelompok, seperti faktor agama, usia, pendidikan, pendapatan, kekayaan, dan lain-lain.¹⁷ Selain itu, Robert Gurr menyatakan bahwa konflik diawali dengan ketidakpuasan, diikuti dengan tindakan untuk mempolitisir ketidak puasaan itu. Satu sisi ada keinginan relatif muncul dari selisih antara nilai harapan dan kemampuan, nilai harapan adalah hal-hal dan kondisi kehidupan yang menurut orang itu menjadi haknya, nilai kemampuan adalah kondisi yang menurut mereka dapat dilaksanakan.¹⁸ setiap individu tentu memiliki perbedaan dalam melakukan segala kegiatan maupun aktivitas, perbedaan tersebut terbagi dari pengetahuan, kemampuan, sikap, kebutuhan maupun kepribadian. Perbedaan-perbedaan yang melekat pada diri individu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, akan tetapi perbedaan dapat menimbulkan pertentangan di antara individu.

Secara garis besar, Wirawan seperti dikutip oleh Wahyudi juga mengemukakan bahwa sebab-sebab timbulnya konflik di latar belakang oleh faktor kepribadian manusia, seperti selalu curiga dan berpikir negatif kepada orang lain, egois, sombong, merasa selalu paling benar, kurang dapat mengendalikan emosinya, dan ingin menang sendiri. Sifat seperti ini muda untuk menyulut konflik jika berinteraksi dengan orang lain.¹⁹ Di samping penyebab konflik tersebut di atas, ada faktor psikologi orang yang mendorong terjadinya konflik. Faktor tersebut meliputi perspsi orang mengenai faktor-faktor penyebab konflik. Orang bisa mempunyai persepsi yang sama mengenai sesuatu, tetapi juga bisa mempunyai persepsi yang berbeda.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 107-108.

¹⁷ Simanjuntak, *Konflik Status dan Kekerasan Orang Batak Toba*. Yogyakarta, Jendela, 2002, hlm 45.

¹⁸ Robert Gurr, *Why Men Rebel*. Princeton University Press, 1971, hlm 24.

¹⁹ Wirawan, *Op.Cit.*, hlm 12.

Perbedaan persepsi mengenai sesuatu seringkali memicu terjadinya konflik.²⁰ Fenomena konflik sosial dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Pertama, konflik sosial timbul karena masyarakat terdiri atas sejumlah kelompok sosial yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kedua, kemiskinan bisa memicu terjadinya konflik sosial. Ketiga, konflik sosial bisa terjadi karena terjadinya migrasi manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Keempat, konflik sosial dapat terjadi antar kelompok sosial yang menimbulkan korban jiwa, musnahnya harta benda dan hancurnya fasilitas umum.

1.5.1.3 Dampak Terjadinya Konflik

Konflik dapat dengan mudah menghasilkan kebencian dan permusuhan antar pribadi. Dalam konteks itu konflik bila tidak dikelola dengan secara konstruktif, akan mengganggu hubungan kerja, membuat stres, mempolarisasi kelompok, dan menjadi prediktor utama tingkat absensi dan turnover karyawan. Di sisi lain, individu cenderung merasa bahwa mereka perlu didengarkan dan diperlakukan dengan adil. Hal tersebut, akan mengurangi intensi konflik, absensi, turnover, dan keluhan formal serta meningkatkan produktivitas dan kerja organisasi, peningkatan omset penjualan, mengurangi intensi ketidakhadiran loyalitas karyawan terhadap organisasi.²¹ Dalam perspektif yang luas, konflik memiliki dampak multidimensional yaitu:²²

- 1) Dampak psikologis Dari perspektif psikologis, konflik mengakibatkan rasa cemas, putus asa, hilang harapan, rasa percaya diri yang rendah, stres, bahkan trauma yang berkepanjangan.
- 2) Dampak ekonomi Dari perspektif ekonomi, konflik mengakibatkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penyediaan, melonjaknya harga di pasaran, inflasi, iklim investasi yang tidak sehat, berkurangnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.
- 3) Dampak sosial Dari perspektif sosial budaya, konflik mengakibatkan renggangnya solidaritas dan kohesi sosial antar kelompok masyarakat, menguatnya senkelompokan in grup, makin kental stereotipe antar kelompok (budaya, agama, suku, ras dan antar golongan).
- 4) Dampak politik Dari perspektif politik, konflik mengakibatkan suburnya politik aliran yang memunculkan terjadinya diktator mayoritas dan tirani minoritas,

²⁰ *Ibid.*, hlm 13.

²¹ *Ibid.*, hlm 81-82.

²² Patrisius Rahabav, *Op.Cit.*, hlm 37. *Ibid.*, hlm 38.

suburnya budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan terdeapaknya sumberdaya manusia potensi dalam panggung politik dan birokrasi pemerintahan.

- 5) Dampak keamanan Dari perspektif keamanan, konflik akan mengakibatkan terjadinya instabilitas, alienasi dan fobia berkebanjangan serta kebencian dan dendam kesumat terutama kepada aparat keamanan. Kondisi ini terjadi manakala aparat dalam pandangan masyarakat bertindak tidak netral.
- 6) Dampak fisik Dari perspektif fisik, konflik mengakibatkan hancurnya infrastruktur dan instalasi publik (kantor, air, listrik, telpon dll), demikian juga sarana pribadi seperti rumah beserta perabotan yang di dalamnya serta fasilitas pribadi lainnya.

Menurut Robby I. Candra, dampak-dampak konflik terbagi menjadi dua yaitu dampak negatif dan dampak positif. Konflik dalam dampak negative yakni dimana adanya pihak yang merasa dirugikan dengan adanya konflik tersebut yang tidak dapat diselesaikan. Sedangkan konflik dalam dampak positif yakni adanya transisi dalam suatu hubungan baru yang dimana akan terus direvisi. Hal tersebut memiliki ciri-ciri dalam transformasi dari elemen konflik sebagai berikut:

- 1) Cara konflik itu diekspresikan.
- 2) Persepsi tentang kebutuhan dan tujuan.
- 3) Persepsi tentang kemungkinan pemenuhannya.
- 4) Tingkat persepsi bahwa kedua belah pihak sebenarnya saling terkait.
- 5) Jenis kerja sama dan oposisi.²³

1.5.1.4 Teori Konflik Antar Kelompok (*Conflict Among Groups*)

Konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing berupaya untuk mencapainya. Masalah ini terjadi karena pada saat kelompok-kelompok makin terikat dengan tujuan atau norma mereka sendiri, mereka makin kompetitif satu sama lain dan berusaha mengacau aktivitas pesaing mereka, dan karenanya hal ini mempengaruhi organisasi secara keseluruhan.

Dahrendorf juga menganalisis hubungan antara kelompok, konflik, dan perubahan. Menurutny ada tiga tipe kelompok yaitu:

1. Kelompok semu yaitu sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama;
2. Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang memiliki struktur, bentuk organisasi, tujuan atau program dan anggota perorangan. Kelompok ini merupakan agen riil dari konflik kelompok;

²³ Robby I. Candra, *Konflik Dalam Hidup Sehari-hari*. Yogyakarta, Kanisius, 1992, hlm 53-54.

3. Kelompok konflik, yaitu kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok actual.

Kelompok-kelompok tersebut merupakan konsep dasar untuk menjelaskan konflik sosial. Kelompok dalam masyarakat tidak pernah berada dalam posisi ideal sehingga selalu ada factor yang mempengaruhi terjadinya konflik sosial. Berkaitan dengan ini Dahrendorf mengatakan, jika anggota kelompok direkrut secara acak dan ditentukan oleh peluang, kelompok kepentingan dan kelompok konflik tidak akan muncul. Jika rekrutmen anggota kelompok berdasarkan struktur akan sangat memungkinkan munculnya kelompok kepentingan hingga kelompok konflik.²⁴

Salah satu bentuk konflik sosial adalah konflik politik. Yang konflik sosial berbeda dari konflik politik adalah kata "politik" yang membawa konotasi tertentu bagi istilah "konflik politik". Konflik politik mempunyai konotasi politik yakni mempunyai keterkaitan dengan negara/pemerintah, para pejabat politik/pemerintahan, dan kebijakan.²⁵

Pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal yaitu konflik yang disebabkan oleh kemajemukan horizontal dan konflik politik yang disebabkan oleh kemajemukan vertikal. Yang dimaksud dengan **kemajemukan horizontal** adalah struktur masyarakat majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras. Kemajemukan kultural dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang berakibat timbulnya konflik karena pada dasarnya setiap kultur akan mempertahankan identitas dan karakteristik budaya. Apalagi pada era sekarang dimana sistem informasi sudah begitu maju sehingga proses masuk dan keluarnya informasi sangat mudah dan hal ini bisa mengancam eksistensi suatu kultur. Dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari terjadinya konflik politik yang diakibatkan kemajemukan horizontal perlu adanya konsensus nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Dengan demikian konflik politik yang disebabkan oleh benturan budaya dapat dihindari. Konflik juga bisa disebabkan oleh faktor kemajemukan horizontal sosial karena masing-masing kelompok yang berdasarkan pada profesi, pekerjaan dan tempat tinggal tersebut memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda bahkan saling bertentangan.

Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang berlawanan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan, konflik dapat ditimbulkan oleh

²⁴ <http://sosbud.kompasiana.com/2011/10/29/mengapa-ada-konflik-ralf-dahrendorf-> membicarakannya/ diakses tanggal 16 April 2012 pukul 10.00

²⁵ Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Hlm 19

kemajemukan vertikal, karena adanya perbedaan bahkan pertentangan kepentingan kelompok mayoritas yang tidak memiliki atau sedikit memiliki kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan dengan kelompok minoritas yang mendominasi kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan. Jadi kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan bisa menjadi penyebab utama timbulnya konflik. Akan tetapi kenyataan menunjukkan perbedaan kepentingan karena kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal tidak dengan sendirinya menimbulkan konflik. Hal ini disebabkan kenyataan adanya masyarakat yang menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan-perbedaan akan menimbulkan konflik jika individu atau kelompok memperebutkan sumber-sumber yang sama seperti kekuasaan, kesempatan dan sebagainya. Konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. Dalam maksud lain yang menyerupai, konflik dapat terjadi apabila terdapat kemungkinan pihak yang merasa dirugikan hingga adanya pihak yang menyulut titik-titik perseteruan. dengan kata lain perbedaan kepentingan karena kemajemukan horizontal dan verikal merupakan situasi dan kondisi yang harus ada dalam konflik, tetapi perbedaan kepentingan itu bukan kondisi yang memadai untuk menimbulkan konflik.

Menurut Fisher, tahapan dinamika konflik meliputi pra konflik, konfrontasi, krisis, akibar, dan pasca konflik.²⁶

1. Prakonflik adalah periode pada saat terdapat suatu ketidak sesuaian sasaran diantara kedua belah pihak atau lebih sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.
2. Konfrontasi memperlihatkan satu tahap pada saat konflik mulai terbuka. Jika ada satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatiflainnya.
3. Krisis adalah puncak konflik. Tahap ketika konflik pecah menjadi bentuk- bentuk aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan missal. Konflik sekala besar ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak saling berlawanan.

²⁶ Fisher dalam Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Kencana, 2010, Jakarta: Hlm 102

4. Pasca konflik adalah situasi diselesaikan dengan cara mengahiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah ke lebih normal diantara pihak-pihak yang berkonflik.

1.5.1.5 Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Metode yang terdapat dalam resolusi konflik yakni merupakan adanya proses manajemen konflik yang digunakan dalam menghasilkan luaran konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan. Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial. Kedua, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula. Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Terakhir, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng. Dapat dikelompokkan menjadi pihak yang terlibat dapat membuat pengaturan sendiri atau dapat pula melalui intervensi pihak ketiga. Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka. Intervensi pihak ketiga terdiri atas resolusi melalui pengadilan, proses administratif, dan resolusi perselisihan alternatif.²⁷ Resolusi konflik melalui mengatur diri sendiri dapat menggunakan dua pola, yaitu:²⁸

- 1) Resolusi konflik tanpa kekerasan adalah resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik dengan tidak menggunakan kekerasan fisik, verbal, dan nonverbal untuk mencapai resolusi konflik yang diharapkan. Menggunakan strategi resolusi konflik seperti ini tidak menimbulkan kekerasan fisik tapi menimbulkan luka psikologi bagi pihak-pihak yang berkonflik.
- 2) Resolusi konflik dengan kekerasan adalah kebalikan dari resolusi konflik poin kesatu diatas. Maka dari itu pihak yang terkait melakukan resolusi konflik

²⁷ *Ibid.*, hlm 177.

²⁸ *Ibid.*, hlm 181-182.

menggunakan metode kekerasan yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan dengan hasil maupun proses penyelesaiannya.²⁹

Sedangkan penjelasan lebih mendetail tentang resolusi konflik melalui pihak ketiga yaitu:³⁰

- 1) Resolusi konflik melalui proses pengadilan. Resolusi konflik dengan langkah ini, menekankan satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat konflik menyerahkan solusi konfliknya pada pengadilan perdata di Pengadilan Negeri melalui gugatan penggugat kepada tergugat. Pihak yang lainnya yang memiliki hubungan dengan objek sengketa bisa juga mengintervensi proses pengadilan.
- 2) Resolusi konflik melalui proses atau pendekatan legislasi. Resolusi konflik melalui pendekatan legislasi adalah penyelesaian konflik melalui perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif. Konflik dengan penanganan tersebut termasuk dalam populasi yang besar,, namun tetap memiliki pengaruh terhadap individu anggota populasi.³¹
- 3) Resolusi konflik melalui proses administratif. Resolusi konflik melalui proses administratif adalah resolusi konflik melalui pihak ketiga yang dilakukan oleh lembaga negara bukan lembaga yudikatif yang menurut undang-undang atau peraturan pemerintah diberi hak untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik dalam bidang tertentu. Pengertian lain dari resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana menurut Miall bahwa resolusi konflik merupakan pengertian komprehensif yang mengandung istilah sebagai langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani sebab-sebab konflik dan bersikeras mengadakan proses penyelesaian dengan cara mengadakan atau membangun hubungan baru yang bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.³²

Secara empirik, resolusi konflik dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya untuk mengendalikan kekerasan bersenjata yang terjadi. Tahap kedua memiliki orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elit politik dari kelompok-kelompok yang bertikai. Tahap

²⁹ *Ibid.*, hlm 177.

³⁰ *Ibid.*, hlm 184-186.

³¹ *Ibid.*, hlm 184-186.

³² Miall, Hugh, dkk, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 31.

ketiga lebih bernuansa sosial dan berupaya untuk menerapkan problem-solving approach. Tahap terakhir memiliki nuansa kultural yang kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktur sosial-budaya yang dapat mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian yang langgeng.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Konflik

Konflik merupakan sebuah proses dalam pertentangan yang dapat ditunjukkan oleh kedua belah pihak ataupun lebih, dimana pihak-pihak tersebut tentunya mempunyai perbedaan dalam kepentingan mengenai objek konflik. Dalam pengertian ini, menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi ketika kedua pihak atau individu dan kelompok dalam kehidupan sosial masyarakat tidak memiliki kesamaan untuk mencapai tujuan.

Myers berpandangan bahwa konflik dipahami berdasarkan dua sudut pandang, yaitu: tradisional dan kontemporer:

1. Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi. Bahkan seringkali konflik dikaitkan dengan kemarahan, agresivitas, dan pertentangan baik secara fisik maupun dengan kata-kata kasar. Apabila telah terjadi konflik, pasti akan menimbulkan sikap emosi dari tiap orang di kelompok atau organisasi itu sehingga akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut pandangan tradisional, konflik haruslah dihindari.
2. Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun, yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antarpribadi bahkan merusak tujuan organisasi.

1.6.2 Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan (Interest Group) adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan public. sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan politik berdasarkan pemilihan umum, kelompok kepentingan itu sendiri dipandang sebagai organisasi, lembaga, bahkan perkumpulan yang menguasai pemerintahan dan

sangat berpengaruh besar terhadap perencanaan kebijakan dan dampak kebijakan pemerintah.

Kelompok kepentingan terbentuk akibat adanya kesamaan kepentingan-kepentingan antar individu. sehingga mereka mengartikulasikan kepentingan tersebut dengan menggabungkan diri dalam kelompok. hal ini dilakukan agar kepentingan tersebut dapat terealisasi karena memiliki bargaining yang tinggi.

1.6.3 Negara dan Masyarakat

Bagi Marx, negara merupakan salah satu aspek dimana kapitalisme subur menjadi “memerintah” dan negara menjadi “diperintah” hal ini disebabkan posisi negara yang longgar dan mempermudah kelas kapitalisme mempertahankan posisinya dan mendominasi dari masyarakat kecil hingga dalam sektor luas. Padahal jika kita menarik pemahaman bahwa kelas sosial yang dibentuk oleh kapitalisme merupakan sistem yang tidaksetara berbeda dengan masyarakat atau warganegara yang terbentuk dalam kesetaraan yang sama dari cita-cita, keyakinan dan nilai yang seharusnya tidak mudah didominasi oleh kelas-kelas kapitalisme bahkan dieksploitasi. Namun karena lemahnya kesadaran masyarakat dan celah negara yang mempermudah kapitalisme mentransformasikan dirinya menjadi kapitalisme demokrasi yang dewasa ini sudah menjadi bagian erat dalam masyarakat yang menghadirkan kepalsuan demokrasi sebagai topeng untuk mengerat sumber-sumber negara dan memperkokoh diri.

Masyarakat yang semakin tak berdaya oleh sumber-sumber kapitalisme yang semakin kokoh mengakibatkan masyarakat terlena dalam bingkai kapitalisme yang menghadirkan demokrasi semu. Masyarakat pada dasarnya terlena dan tidak memahami posisi mereka namun karena beberapa sumber ekonomi yang mereka miliki telah digrogoti kapitalisme maka mereka baru sadar dan paham bahwa mereka berada pada posisi terendah dalam piramida kekuasaan. Hal yang dihadirkan oleh masyarakatpun akhirnya mempertahankan sumber mereka dengan bentuk konflik . Konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). Dengan kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa sesungguhnya ia inginkan.³³ kepentingan dan konflik saling berhubungan dan menjadi kesatuan mengingat konflik hadir ketika kepentingan yang saling bertolakan.

Masyarakat dan kapitalisme ketika terakumulasi dalam konflik maka berada pada dua kutub yang berbeda yang saling ingin memiliki, mempertahankan dan saling bertentangan. Hal ini bisa disebabkan dalam berbagai hal baik kepentingan maupun nilai-nilai yang dianggap

³³ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm 21

penting maka dalam setiap manusia kehadiran konflik berbeda-beda. Kehadiran konflik selalu diidentifikasi dengan kekerasan meskipun tidak semua konflik berakhir dengan kekerasan. Menurut Prof. Ramlan Surbakti konflik non-kekerasan pada umumnya dapat ditemui dalam masyarakat-negara yang memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan Negara, dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Sedangkan konflik yang mengandung kekerasan, pada umumnya terjadi dalam masyarakat-negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara, dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Contohnya pemberontakan, separatism dan revolusi.³⁴

Ilmuan Dean G purit melihat konflik juga berbeda dengan Karl Marx, menurut Dean konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara silmutan. Selain itu Dean G Purit melihat konflik sebagai sebuah kepentingan yang berbeda antara tujuan, dan standar. Tujuan dan standar yang dimaksud adalah tujuan sebagai akhir yang lebih-kurang, tepat dari arah yang diperjuangkan oleh seseorang sedangkan standar adalah tingkat pencapaian minimal yang bila lebih rendah dari padanya orang akan menganggapnya tidak memadai²⁵. Tujuan yang sama dan standart yang semakin besar perbedaan, maka semakin besar konflik terjadi dalam masyarakat.

Secara ringkas Dean melihat proses konflik berdasarkan step yang diajukan yaitu melalui sumber-sumber konflik yang terjadi di masyarakat yang kemudiah dilakukan strategi dalam penyelesaiannya, taktik-taktik dalam menyelesaikan persoalan, selanjutnya dilakukan eskalasi dan stabilitas yang harus diketahui sebelumnya adalah proses-proses apa yang dapat menimbulkan eskalasi, kemudihan persistensi eskalasi, dilanjut kemandekan dan de-eskalasi dan akhirnya adalah problem solving. Maka Dean G Pruitt mengidentifikasi konflik dalam sebuah proses yang dapat dianalisis dan diselesaikan dalam pilihan-pilihan yang ada. Maka Dean juga melihat konflik memunculkan dua yang dinamis yang mana konflik hadir sebagai sisi positif maupun sisi negatif.³⁵ Konflik sebagai sisi negative adalah identik dengan sifat merusak, kekerasan dan juga perubahan meskipun dalam perubahan ada yang baik maupun buruk namun konflik sisi negative sering hadir jika berada pada nilai-nilai kekerasan yang merugikan dan merusak. Sedangkan untuk sisi positif konflik menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin merupakan persemaian yang subur bagi terjadinya perubahan sosial dan juga

³⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hlm 191

³⁵ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm 10

konflik memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. Maka dalam keberadaan konflik dalam sebuah masyarakat perlu dipahami dan dianalisis sehingga menemukan titik permasalahan dan penyelesaiannya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah dalam konflik politik kepentingan pembangunan, yang mana terjadi di wilayah masyarakat penduduk Kulon Progo. Dalam menjelaskan hal ini, peneliti melihat faktor-faktor yang menyebabkan konflik terjadi antara masyarakat, pemerintah, angkasa pura, dan LBH serta intensitas yang terjadi dalam konflik tersebut. Sikap yang diperlihatkan oleh masing-masing pihak sendiri lebih lanjut akan ditemukan jika faktor dan intensitas konflik telah ditemukan.

1.7.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif deskriptif, penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dengan adanya data tersebut maka dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif sangat melawan paradigma positivistik yang ada dalam penelitian kuantitatif.³⁶ Penelitian ini lebih menekankan pada wawancara, pengambilan data personal. Dengan adanya data ini maka penelitian kualitatif lebih menekankan dalam mencari sebuah jawaban mengapa terjadi suatu fenomena, kaitannya dengan penelitian ini adalah mengapa terjadi suatu konflik kepentingan dalam pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta baru ini.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Desa ini adalah Desa yang paling disorot dalam konflik pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta baru karena dinilai paling berdampak dalam segala aspek, baik dari segi sosial hingga permasalahan ekonomi. Desa inipun menjadi salah satu Desa yang masyarakatnya diharuskan untuk melakukan relokasi karena adanya pembangunan bandara, sehingga penulis memilih bahwa lokasi penelitian di Desa Glagah adalah yang paling tepat.

³⁶ Bagong Suyanto, Sutinah (ed) "Metodologi Penelitian Sosial", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Desa Glagah sendiri memiliki pariwisata yang dinamakan pantai Glagah. Dalam pantai tersebut masyarakat banyak menggantungkan nasib dalam kehidupan melalui berjualan ataupun pengelolaan pantai Glagah. Jika bandara dibangun, maka salah satu yang dirugikan adalah penjual yang berada di pantai tersebut. Apakah relokasi akan tetap menguntungkan bagi mereka, atau malah banyak merugikan bagi masyarakat.

Belum lagi permasalahan masyarakat sekitar yang bisa saja menjadi masyarakat yang digusur dengan alasan untuk pelebaran bandara. Hal ini sangat merugikan masyarakat Desa Glagah, maupun sekitar Desa Glagah. Keberadaan mereka akan terancam secara tidak langsung jika bandara dibangun disana. Pembangunan yang memakan lahan ratusan hektare tersebut akan menjadi ancaman terbarukan bagi masyarakat yang berada disana.

1.7.4 Subyek Penelitian

Peneliti akan melakukan pencarian informasi terlebih dahulu pada pihak-pihak yang telah memenuhi kriteria yang terkait langsung dengan permasalahan ini. Informan tersebut adalah Bupati Kulonprogo yang dilegitimasi menjadi penguasa daerah Kulonprogo sebagai perwakilan pemerintah daerah yang masyarakatnya terkena pembangunan bandara Kulonprogo, Kepala Proyek PT Angkasa Pura I selaku pihak yang proses bandara dari awal perencanaan hingga pembangunannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulonprogo dalam perencanaan wilayah Kulonprogo. Selain pihak dari pemerintah, peneliti pun melakukan pencarian informasi kepada akademisi, LBH Yogyakarta sebagai pihak yang mengadvokasi masyarakat yang menolak, serta anggota dari WTT yang terlibat langsung dengan konflik tersebut.

Peneliti menggunakan alat perekam, buku, serta hal-hal yang menunjang untuk dapat terambilnya penelitian ini. Peneliti harus meminta izin terlebih dahulu jika memang harus melakukan perekaman agar tidak terjadi ketidaknyamanan oleh informan. Peneliti pun berupaya agar informan mengatakan yang sebenar-benarnya dalam isu tersebut, mengapa konflik bisa terjadi dalam hal tersebut.

1.7.5 Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengambilan data adalah dengan menggunakan teknik purposif. Teknik purposif adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek

atau situasi sosial yang diteliti. Penentuan sumber data dalam teknik purposif ini pada orang yang diwawancarai pada saat penelitian dilakukan, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam (deep interview) pada narasumber yang telah dipilih yaitu orang atau tokoh yang dianggap memepresenytasikan suara dari setiap kelompok yang ada ataupun orang yang dianggap mengetahui proses konflik PT. Angkasa Pura II. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui observasi.

Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu *pertama*, pengumpulan data primer. *Kedua*, pengumpulan data sekunder. Data primer adalah keterangan yang diperoleh langsung dari informannya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melaui sumber lain, baik lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui :

1.7.5.1 Teknik Wawancara

Data primer ini diperleh melalui wawancara langsung . teknik wawancara ini dapat dipahami sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam aktivitas interview peneliti melakukan wawancara dengan bantuan alat perekam yang sesuai dengan pedoman wawancara, tergantung kelompok informannya, Peneliti menggunakan alat bantu catatan maupun alat perekam digunakan pedoman wawancara untuk melakukan indepth interview sehingga posisi informan tidak seperti sebagai pesakitan/terdakwa.

Wawancara mendalam (indepth interview) digunakan untuk memperoleh data data sekunder dari subyek penelitian. Sedangkan prosedur wawancara yang digunakan adalah tidak terstruktur, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara berupa kutipan langsung dari subyek/informan tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya maupun observasi langsung terdiri dari pemberian rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati sejalan dengan pendapat tersebut, Spradley mengatakan bahwa untuk memahami realitas sosial yang penting diperhatikan adalah tempat (space). Aktor (subject) dan aktivitas.

Wawancara mendalam dilakukan dengan berpatokan pada interview guide. Yakni daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka dan ingin memperoleh jawaban mendalam. Dalam interview guide, peneliti tidak membuat instrumen interview yang terstruktur dan baku, melainkan hanya mencantumkan daftar pertanyaan yang sifatnya umum berupa rambu-rambu untuk mengarahkan peneliti agar tidak terjebak dalam pertanyaan dan dialog dengan narasumber diluar permasalahan dan tujuan penelitian. Subyek atau narasumber yang diwawancara adalah orang-orang yang ditentukan oleh peneliti, dan paham mengenai realitas konflik yang terjadi.

1.7.5.2 Studi Pustaka

Pengumpulan data dari buku – buku, berita – berita , dan jurnal-jurnal penunjang yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Data di sini digunakan untuk mempertajam analisa penulis. Melalui sumber – sumber pustaka tersebut peneliti akan memperoleh pengertian mengenai konsep – konsep dan teori untuk melihat fenomena permasalahan yang diteliti. Data – data dari studi pustaka memiliki tingkat validitas yang tinggi, sesuai relevansi sumber yang dipilih untuk memperkuat kerangka berpikir peneliti.

1.7.6 Pengolahan Data

Langkah analisis data ini bertujuan untuk mencari dan menata data secara sistematis dari catatan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang telah dilakukan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengkajian dan penyusunan secara sistematis semua transkrip wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain yang dihimpun untuk memperoleh deskripsi secara utuh tentang persepsi masyarakat dan mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan dalam bentuk laporan penelitian.

Analisis data dalam laporan penelitian ini disusun pembahasannya berdasarkan tahap-tahap yang ada dalam fenomena konflik yang terjadi, untuk menggambarkan mekanisme penyebab konflik, dinamika konflik, serta penyelesaian konflik

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah penjabaran data berbentuk narasi. Narasi tersebut dihasilkan melalui transkrip wawancara, dan disesuaikan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Setelah itu analisis hasil temuan yang ada, lalu dihubungkan dengan teori dan menyusun kesimpulan. Hal ini sesuai dengan teknik analisa data yang dilakukan oleh John W. Creswell, dimana dalam teknik analisa data tersebut pada awalnya keseluruhan wawancara di kelompokkan dalam beberapa bagian lalu di jadikan menjadi data dan di

cocokkan dengan teori yang digunakan³⁷

Karena data – data hasil penelitian di lapangan tidak berupa angka, maka bentuk penyajian data tidak berupa tabel dengan ukuran – ukuran statistik, tetapi dalam bentuk uraian wawancara. Analisa sarta dilakukan untuk mendapatkan makna yang ada pada data dan implikasi penelitian tersebut, terutama jika dikaitkan dengan kerangka teori dan pemikiran yang sudah ada. Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dengan mencatat temuan data di lapangan dan menggunakan alat bantu perekam yang wujudnya ditampilkan dalam bentuk rekaman audio.

³⁷ J W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches, 2013, doi:10.1007/s13398-014-0173-7.2.